



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI RIAU

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

**Nomor : 000.7.2.8/DKP-Sekr/II/2025/89.3**

**Tanggal : 13 Februari 2025**



Jalan Pattimura No. 6  
Telp (0761) 22921  
Fax. (0761) 23191  
PEKANBARU - 28131  
2024



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id  
PEKANBARU

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**



**SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19710729 199302 1 003

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 dalam rangka perwujudan visi Provinsi Riau yaitu “Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu). LKJiP ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja Tahun 2024, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menggambarkan capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja tersebut akan menggambarkan progres pembangunan Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Strategis Tahun 2019-2024.

LKJiP Tahun 2024 ini, merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya LKJiP ini dapat menjadi alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Semoga penyusunan LKJiP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain dan pihak yang membutuhkan.

Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2025  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau,



H. Yurnalis, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710417 200212 1 006

## “ *Eksekutif Summary* “

---

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2024 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan.

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut : Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan dengan Indikator 1). NTN Tahun 2024 memiliki target 113% dan realisasi 104,44%, sehingga capaiannya adalah 92,42% dari target dengan menggambarkan bahwa nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada Tahun 2024, 2). NTPi Tahun 2024 memiliki target 113% dan realisasi 100,35%, sehingga capaiannya adalah 88,80%.

### **Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan**

***Jumlah Produksi Perikanan Target 308,324,84 Ton Realisasi 268.760,28 Ton atau 87,16%,***

- Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Target 137.199,87 Ton Realisasi 125.775,57 Ton atau 80,00 %.
- Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Target 131.389,52 Ton Realisasi 127,470,63 Ton atau 97,00 %.
- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton) Target 19.738,45 Ton Realisasi 15.514,08 Ton atau 78,59%.

**Sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%)** yaitu ***Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)*** Tahun 2024 memiliki target 90% dan realisasi 59,05% sehingga capaiannya 65,61%.

**Sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** yaitu ***Persentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)*** memiliki target 22 % dan realisasi 11,66% sehingga capaiannya 53,00%.

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Tugas dan Fungsi	10
1.4. Aspek Strategis Organisasi	13
1.5. Permasalahan Utama	14
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	18
2.2. Perjanjian Kinerja	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>27</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2. Realisasi Anggaran	45
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>48</b>
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh DKP Provinsi Riau Untuk meningkatkan Kinerja kedepan	49
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024	6
1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.	7
1.3. Jumlah ASN Berdasarkan Unit Kerja.	8
1.4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	9
1.5. Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis	13
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024	20
2.3.1 Indikator Kinerja Program Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	24
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1.2 Capaian Realisasi Jumlah Produksi Perikanan (ton)	29
3.1.3 Capaian Realisasi Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan	39
3.1.4 Capaian Realisasi tata kelola ruang laut, pesisir dan Pulau – pulau kecil (%)	42
3.2.1 Realisasi Kinerja Dan Anggaran	47

# DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1.2.1.	Bagan Organisasi Tat Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 4
1.2.2.	Bagan Organisasi Tata Kerja UPT. Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 5
3.1.1.1.1.	Penyerahan kapal penangkapan ikan (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti) 30
3.1.1.1.2.	Penyerahan alat penangkap ikan di Kabupaten Siak 30
3.1.1.1.3.	Penyerahan alat penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hilir 30
3.1.1.1.4.	Penyerahan alat penangkapan ikan di Kota Dumai 30
3.1.1.1.5.	Penyerahan kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kab. Rokan Hilir 30
3.1.1.1.6.	Penyerahan alat penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti 30
3.1.1.1.7.	Penyerahan kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kabupaten Pelalawan 30
3.1.1.1.8.	Penyerahan kapal fiber 1 GT Mesin Katinting di Kabupaten Rokan Hulu 31
3.1.1.1.9.	Penyerahan kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kabupaten Kampar 31
3.1.1.1.10.	Penyerahan Kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kab. Siak 31
3.1.1.1.11.	Penyerahan Alat Penangkapan Ikan di Kab. Rokan Hilir 31
3.1.1.1.12.	Penyerahan Kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kota Pekanbaru 31
3.1.1.1.13.	Sosialisasi Penerapan Log Book Penangkapan Ikan di Kabupaten Bengkalis 32
3.1.1.1.14.	Sosialisasi Penerapan Log Book Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir 32
3.1.1.1.15.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap 2024 Kota Dumai 32
3.1.1.1.16.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis 32
3.1.1.1.17.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti 32
3.1.1.1.18.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan 32
3.1.1.1.19.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir 33
3.1.1.1.20.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Siak 33
3.1.1.1.21.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir 33
3.1.1.1.22.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti 33
3.1.1.1.23.	Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir 33
3.1.1.1.24.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Laut 34
3.1.1.1.25.	Menampilkan Produk Perikanan Melalui Pameran Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 36
3.1.1.1.26.	Foto Bersama Pemenang Lmsi Dengan Pj. Ketua Tp-Pkk Dan Forikan Serta Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau 36
3.1.1.1.27.	Proses penerimaan produk perikanan PT. AGRO BOGA UTAMA KOTA PEKANBARU 36
3.1.1.1.28.	CV. Bantan Sukses Bersama Kabupaten Bengkalis 36
3.1.1.1.29.	CV. Bantan Sukses Bersama Kabupaten Bengkalis 36
3.1.1.1.30.	Koperasi Bina Maju Jaya Kabupaten Rokan Hilir 36
3.1.1.1.31.	PT. Delta Mina Perkasa Kabupaten Kampar 37
3.1.1.1.32.	PT. Delta Mina Perkasa Kabupaten Kampar 37
3.1.1.1.33.	CV. Hadi Wijaya Abadi Kabupaten Bengkalis 37
3.1.1.1.34.	CV. Hadi Wijaya Abadi Kabupaten Bengkalis 37
3.1.1.1.35.	Koperasi Jasa Kerapu Kabupaten Rokan Hilir 37
3.1.1.1.36.	Koperasi Jasa Kerapu Kabupaten Rokan Hilir 37

3.1.2.1.1.	Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Pengawasan Perikanan Tangkap ke Kabupaten Indragiri Hulu	41
3.1.2.1.2.	Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Melakukan Identifikasi Lokasi Penanaman Mangrove Tahun Anggaran 2024 ke Kab. Kep. Meranti	41
3.1.2.1.3.	Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Melakukan Identifikasi Lokasi Penanaman Mangrove Tahun Anggaran 2024 ke Kab. Kep. Meranti	41
3.1.3.1.1.	Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Kota Dumai (PT. Inti Benua Perkasa)	44
3.1.3.1.2.	Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Kota Dumai (PT. Oleokimia Sejahtera Mas dan PT. Sari Dumai Sejati)	44
3.1.3.1.3.	Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Kota Dumai (PT. Calang Sejati Indah dan PT. Ivomas Tunggal)	44

# DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	51
2. Realisasi Anggaran Tahun 2024	53
3. Penghargaan yang Diperoleh selama Tahun 2024	61

# BAB I

## PENDAHULUAN



## 1.1.LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggung-jawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang - undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara priodik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Penyusunan LKJiP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKJiP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

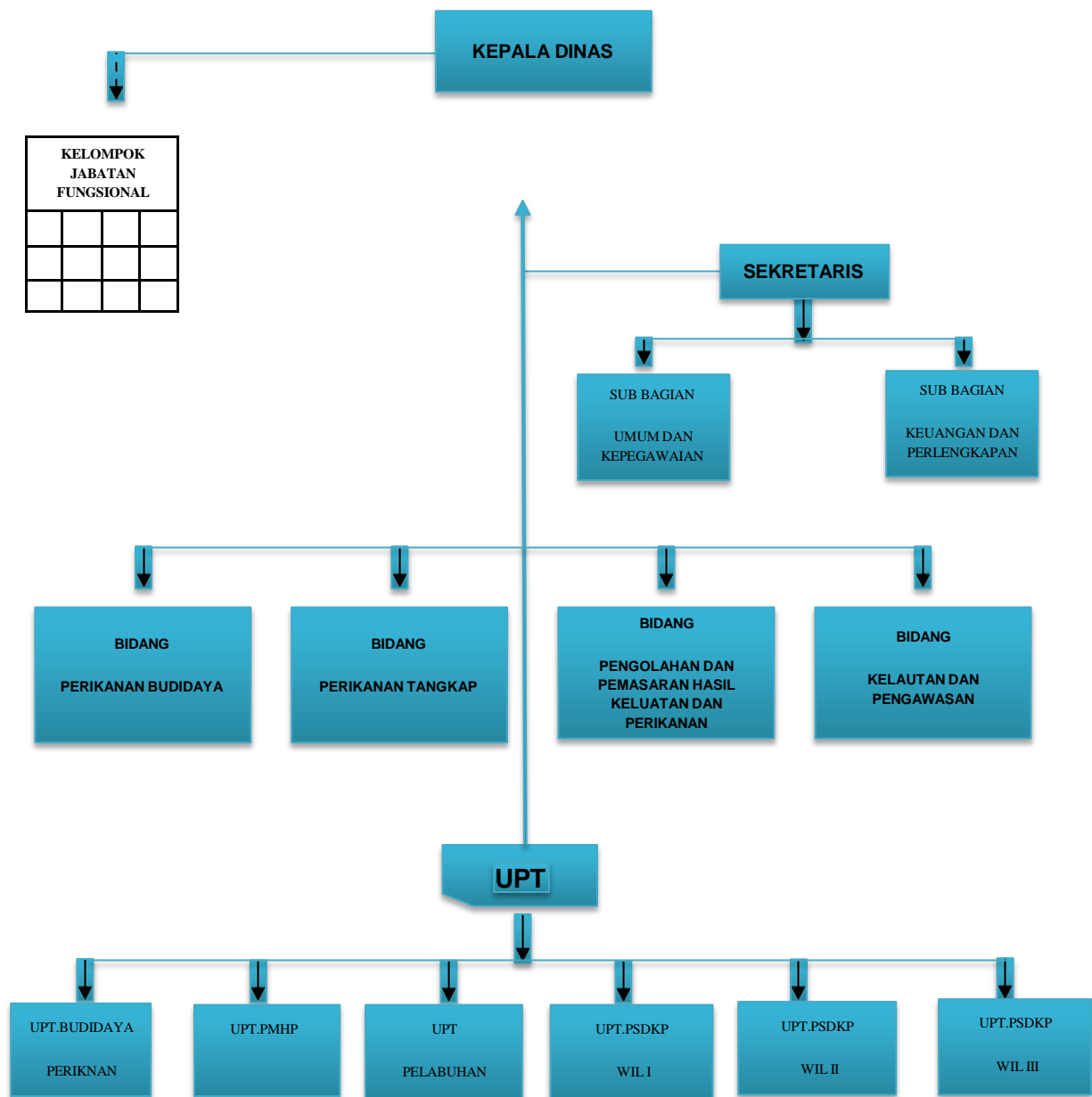


## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

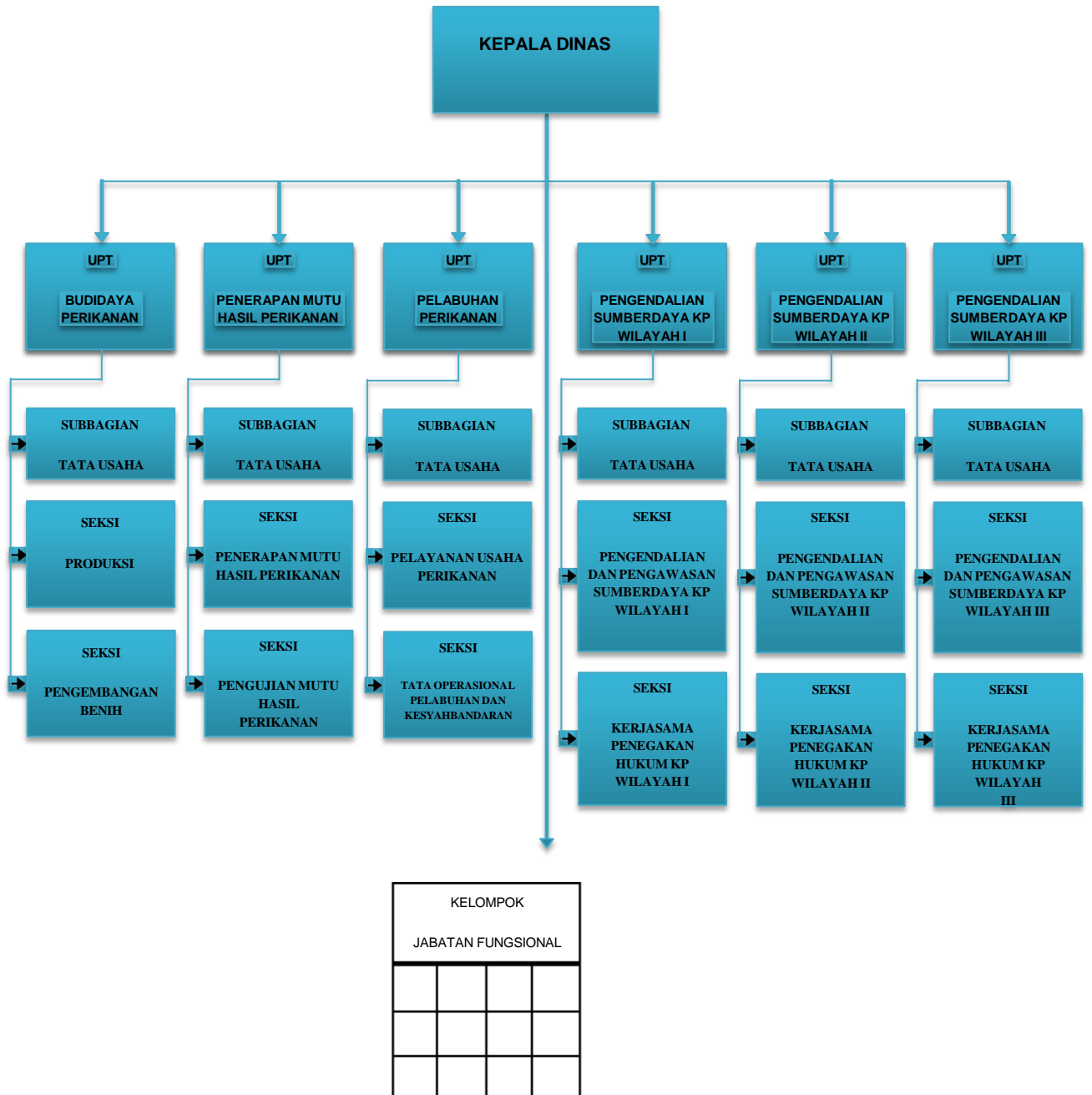
### 1.2.1. Struktur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Sehingga dinyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang diserahkan tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

1. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari
    - 1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dan;
    - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. Bidang Perikanan Budidaya;
  - c. Bidang Perikanan Tangkap;
  - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP)
  - e. Bidang Kelautan dan Pengawasan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (esselon II.a)
3. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan pejabat Administrator (esselon III.a)
4. Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas (esselon IV.a)



**Gambar 1.2.1.**  
**Bagan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**



Gambar 1.2.2.  
 Bagan Organisasi Tata Kerja UPT.Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Provinsi Riau

## 1.2.2. Sumberdaya Manusia

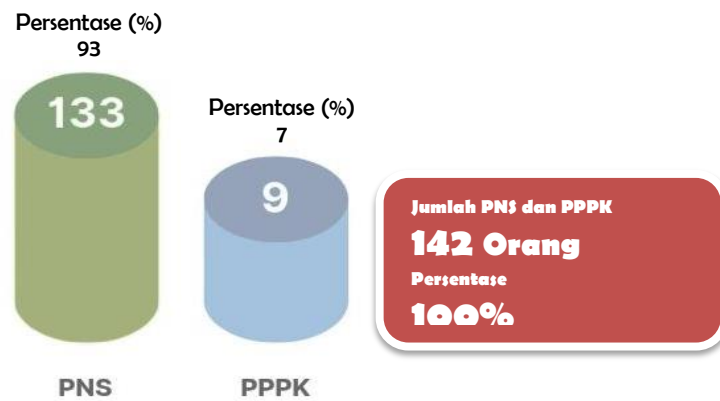


Diagram 1.2.2.  
Komposisi Status ASN DKP Provinsi Riau

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada Tahun 2024 memiliki sumberdaya manusia secara keseluruhan termasuk di UPT sebanyak 133 orang untuk ASN laki-laki berjumlah 68 orang 51,13 %, sedangkan untuk ASN Perempuan berjumlah 65 orang, atau sekitar 48,47 %. Untuk komposisi pegawai berdasarkan pendidikan, golongan, dan unit kerja dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel. 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024

JUMLAH ASN	PENDIDIKAN TERAKHIR						TOTAL
	S3	S2	S1	D4	D3	SMA	
Jumlah ASN Laki-Laki	-	19	35	3	2	9	<b>68</b>
Jumlah ASN Perempuan	1	17	37	-	8	2	<b>65</b>
Total	1	36	72	3	10	11	<b>133</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagian besar berkualifikasi Sarjana (Strata satu/S1) dengan jumlah sebanyak 72 orang atau 54,13 % sedangkan Kualifikasi Pendidikan Strata Dua (S-2) adalah sebanyak 36 orang atau 27,07 %, Kualifikasi Pendidikan Strata Tiga (S-3) adalah sebanyak 1 orang atau 0,75 %, kualifikasi pendidikan Diploma Empat (D4) adalah sebanyak 3 orang atau 2,26 %, kualifikasi pendidikan Diploma Tiga (D3) adalah sebanyak 10 orang atau 7,52 %, sedangkan SLTA berjumlah 11 orang atau 8,27 % dari total jumlah pegawai sebanyak 133 orang.

**Tabel. 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**

JUMLAH ASN	GOLONGAN												TOTAL
	IV.d	IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	
ASN Laki- Laki	1	2	5	5	23	10	10	8	1	2	1	-	<b>68</b>
ASN Perempuan	-	-	3	5	33	9	4	4	2	5	-	-	<b>65</b>

Jumlah PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari: Pembina (golongan IV) berjumlah sebanyak 21 orang atau 15,79 %, Penata (Golongan III) berjumlah sebanyak 101 orang atau 75,94 %, Pengatur (Golongan II) berjumlah sebanyak 11 orang atau 08,27 % dari total jumlah pegawai sebanyak 133 orang.

**Tabel 1.3. Jumlah ASN Berdasarkan Unit Kerja**

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)		JUMLAH	Persentase
		L	P		(%)
1	Sekretariat	11	20	31	23,31
2	Bidang Perikanan Budidaya	4	7	11	08,27
3	Bidang Perikanan Tangkap	5	8	13	09,77
4	Bidang P2HKP	1	9	10	07,52
5	Bidang Kelautan dan Pengawasan	6	7	13	09,77
6	UPT Budidaya Perikanan	11	4	15	11,28
	UPT Pelabuhan Perikanan	7	2	9	6,77
9	UPT PMHP	4	3	7	05,26
10	UPT Pengawasan SDKP Wilayah I	5	3	8	06,02
11	UPT Pengawasan SDKP Wilayah II	6	1	7	05,26
12	UPT Pengawasan SDKP Wilayah III	8	1	9	06,77
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>133</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berdasarkan Unit Kerja pada sekretariat, Bidang/UPT tersebar secara merata dan proporsional. Pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat penempatan personil yang sejumlah 31 orang atau sebesar 23,31 %, hal ini disebabkan karena sekeretariat merupakan fungsi utama untuk menjalankan administrasi dan pengkoordinasian kegiatan perkantoran. Sedangkan penempatan personil yang paling sedikit adalah pada UPT PMHP dan UPT Pengawasan SDKP Wilayah II sebanyak 7 orang atau sebesar 05,26 %.

Dilihat dari rasio penempatan jumlah pegawai antara satu unit dengan unit lainnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Meskipun demikian kondisi penempatan personil ini belum dapat dikatakan ideal. Oleh sebab itu penempatan personil harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan sesuai dengan beban kerja pada masing-masing unit.

### 1.2.3. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tidak terlepas dari ketersediaan Asset dan Modal perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran, dapat dilihat pada Tabel dibawah :

Tabel. 1.4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang dalam Bidang
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
	a. Alat-alat Berat	4
	b. Alat-alat Angkutan :	
	• Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	34
	• Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20
	• Alat Angkut Apung Bermotor	25
	• Alat Angkut Apung Tak Bermotor	6
	c. Alat-alat Bengkel	298
	• Alat Bengkel Bermesin	232
	• Alat Bengkel Tak Bermesin	66
	d. Alat ukur	19
	e. Alat-alat Pertanian/ Pertenakan	1138
	f. Alat-alat Kantor	327
	g. Alat rumah tangga	1695
	h. Alat Studio	57
	i. Alat- Komunikasi	116
	j. Alat-alat Kedokteran	1
	k. Unit-unit Laboratorium	218
	l. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4
	m. Peralatan Non Senjata Api Alat Keamanan	23
	n. Meja Kerja / Rapat Pejabat	700
	o. Peralatan Pemancar	1
	p. Komputer	166
	q. Peralatan Komputer	201
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	94
	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8
	b. Bangunan Monumen	-
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI dan JARINGAN</b>	
	a. Jalan dan Jembatan	24
	• Jalan	21
	• Jembatan	3
	b. Bangunan Air/Irigasi	91
	• Bangunan Air Irigasi	46
	• Bangunan Air Pasang Surut	12
	• Bangunan Air Rawa	3
	• Bangunan Air Bersih/Baku	36
	• Bangunan Air Kotor	-
	c. Instalasi	12
	• Instalasi Air Minum Bersih	7
	• Instalasi Gardu Listrik	21
<b>5</b>	<b>d. Jaringan</b>	<b>31</b>
	• Jaringan Air	14
	• Jaringan Listrik	10
	• Jaringan Telp	1
<b>6</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
	a. Gedung dan Bangunan (Sedang Renovasi)	2

## 1.3.TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.1. Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Gubernur Riau ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau kemudian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan ;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan ;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Kelautan dan Pengawasan ;
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.2.Sekretariat

1. Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
2. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja

- Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
  - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.3.2. Bidang Perikanan Budidaya**

1. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait produksi dan usaha budidaya, pengembangan kawasan budidaya, pakan dan kesehatan.
2. Bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang perikanan budidaya;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang perikanan budidaya;
  - c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
  - d. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya antara lain meliputi penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan produksi dan usaha budidaya, pengembangan kawasan budidaya, pakan dan kesehatan ikan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3.3. Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan Tangkap**

1. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan, kenelayanan, dan pengendalian penangkapan ikan.
2. Bidang perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang perikanan tangkap;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang perikanan tangkap;
  - c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
  - d. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap.
  - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.3.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan**

1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait pemasaran dan promosi, usaha dan kelembagaan, dan pembinaan mutu produk.
2. Bidang pengolahan dan pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
  - d. Pelaksanaan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **1.3.5. Tugas dan Fungsi Bidang Kelautan dan Pengawasan**

1. Bidang Kelautan dan Pengawasan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. Bidang Kelautan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kelautan dan Pengawasan;
  - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kelautan dan Pengawasan;
  - c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang Kelautan dan Pengawasan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
  - d. pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Pengawasan antara lain meliputi penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi, pengawasan sumber daya perikanan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kelautan dan Pengawasan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat; perbenihan; laboratorium; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

## 1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pada pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan fungsi teknisnya di dalam mengkoordinasikan kegiatan, antara lain untuk kegiatan administrasi perencanaan anggaran dan evaluasi dilaksanakan oleh sekretariat, untuk pelaksanaan teknis kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan oleh bidang perikanan budidaya, kegiatan perikanan tangkap dilaksanakan oleh bidang perikanan tangkap, untuk kegiatan pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh bidang kelautan dan pengawasan serta pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan yang meliputi pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar dan promosi serta usaha dan logistik. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang dari aspek teknis dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan spesifikasi teknisnya yaitu unit pelaksana teknis (UPT).

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari bidang teknis dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5. Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis

Program	Masalah	Isu Strategis	Rencana Perumusan Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
1	2	3	4
1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. Akses terhadap data dan informasi perikanan dan volume perdagangan/ekspor hasil perikanan belum optimal 3. Peran dan fungsi unit pelaksana teknis belum optimal 4. Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPT belum terjalin dengan Baik 5. Tersebarunya pelaku usaha perikanan sehingga sulit dijangkau dalam pembinaannya dan Pengawasannya 6. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 7. Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang (Keterbatasanjumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara.pembang unan perikanan khususnya tenaga professional bidang perikanan yaitu ahli pakan, pembesaran,	1. Mahalnya biaya input produksi perikanan. 2. Tumpang tindih pemanfaatan Lahan di wilayah pesisir dan laut 3. Kemampuan permodalan pelakuusaha perikanan terbatas. 4. Penerapan teknologi terbatas. 5. Tidak tersedianya formasi rekrutment aparatur yang dibutuhkan seperti sarjana perikanan dan sarjana teknis lainnya seperti pengawas perikanan, penyuluh perikanan, ahli pakan, pembesaran, pembenihan, PPNS, pengukur kapal, laboratorium dan sebagainya. 6. Banyak aparatur yang dimutasikan ke institusi lain. 7. Tingkat pengetahuanpembud idaya masih rendah terutama terhadap	1. Komitmen Pimpinan. 2. Potensi perikanan yang masih luas. 3. Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan. 4. Penyediaan dan penempatan tenagaaparatur yang berkompeten dan tepat. 5. Tersedianya petugas KKMB dan tersedianya SKIM Kredit pada usaha perikanan. 6. Gencarnya promosi makan ikan melalui Forikan dan Gemarikan 7. Memfasilitasi pelaku usaha perikanan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan. 8. Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pelatihan terhadap penguasaan teknologiBahan baku pakan tersedia dalamumlah yang banyak. 9. Tersedianya regulasi kelautan dan perikanan

Program	Masalah	Isu Strategis	Rencana Perumusan Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
1	2	3	4
	pembenihan, pengolahan dan PPNS). 8. Pelayanan CBIB dan CPIB belum optimal karena terbatasnya jumlah Auditor. 9. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pelaku usaha perikanan. 10. Data kelautan dan perikanan belum akurat.	manajemen pemeliharaan 8. Minat untuk mengkonsumsi ikan masih rendah.	

## 1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, khususnya pada kurun waktu 2019 - 2024 dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Pemanfaatan Potensi Penangkapan Belum Optimal

Perikanan di Riau sebagian besar terdiri dari nelayan yang memiliki sarana/prasarana, keterampilan, pengetahuan dan modal yang terbatas serta memiliki pola penangkapan yang one day trip. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan daya saing mereka rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang masih sederhana antara lain belat, jaring, lukah, pancing, rawai dan jala; armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil terdiri dari armada yang tidak menggunakan mesin seperti sampan dan yang menggunakan mesin yang berukuran kurang dari 5 GT; kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah dibuktikan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang rata-rata tamat Sekolah Dasar; dan akses permodalan yang terbatas menyebabkan nelayan kesulitan mengajukan kredit, karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

### 2. Penurunan Potensi Sumberdaya Ikan (SDI)

Pemanfaatan potensi sumber daya ikan, yang tidak berkelanjutan, dan yang tidak ramah lingkungan mengakibatkan terjadinya degradasi habitat di wilayah pesisir, terumbu karang, mangrove, dan perairan umum. Di sisi lain, penurunan kualitas lingkungan juga disebabkan adanya pencemaran perairan oleh limbah industri serta limbah rumah tangga (domestic waste), serta penggunaan bahan peledak (potassium) dalam penangkapan ikan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kualitas potensi sumber daya ikan, dan berdampak pada pendapatan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap.

Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik. Pengendalian dan pengawasan sumber daya Ikan (SDI) melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove, pemasangan rumpon, pengalihan usaha penangkapan ikan (dari wilayah padat tangkap ke wilayah jarang tangkap), penawaran mata pencaharian alternatif di bidang budidaya perikanan dan penanganan hasil perikanan serta pasca panen, peningkatan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) baik teknik penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta peningkatan pengetahuan dan pembinaan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, solusi yang ditawarkan untuk menjaga kelestarian kawasan mangrove adalah mengarahkan Pokwasmas agar mengambil peran aktif pada kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa khususnya yang berada di daerah kawasan mangrove. Harapan dari solusi tawaran ini adalah masyarakat nelayan pada gilirannya akan mengambil manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan mangrove yang ada di sekitar pemukiman nelayan.

Adanya limbah pabrik yang masuk ke aliran sungai menyebabkan tercemarnya perairan, sehingga terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya hasil tangkapan nelayan disekitar pabrik pada sungai kampar dan sungai siak. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

### 3. IUU Fishing

Permasalahan IUU fishing dapat mengancam keberlangsungan ekosistem laut ketahanan pangan dan kedaulatan wilayah perbatasan, DKP Provinsi Riau memiliki kapal pengawas perikanan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya SDM pengawasan dan aparat petugas yang ada saat ini masih terbatas yang memiliki sertifikat pengawas SDI dan Sertifikat PPNS. Akibatnya pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak berjalan optimal dan lemahnya penegakan hukum. Kewenangan tindakan pemeriksaan dan penghentian aktifitas IUU fishing dilapangan hanya dapat dilakukan oleh petugas bersertifikat.

Dampak IUU fishing adalah hilangnya peluang, nelayan di provinsi Riau serta mengancam pasokan makanan masyarakat terutama masyarakat pesisir.

Penyebab IUU fishing masuknya kapal asing ke provinsi Riau dengan mudah. Penangkapan ikan dengan trawl pukat harimau menggunakan kapal kapal bermuatan besar, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.

Dalam hal tersebut perlu dilakukan pembinaan lebih intensif pada kelompok masyarakat pengawas ( POKMASWAS ) agar berperan aktif pada pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari, ramah lingkungan dan ikut serta merehabilitasi kerusakan kawasan mangrove serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani pengelolaan lingkungan pada daerah kawasan mangrove yang menyebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 4. Pemanfaatan potensi budidaya perikanan belum optimal

Pada saat ini kawasan perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan sedang digalakkan di Provinsi Riau. Namun demikian perkembangan kawasan ini belum didukung dengan prasarana penunjang seperti jaringan irigasi untuk budidaya air tawar dan air payau, jalan produksi dan jaringan listrik untuk peningkatan produksi perikanan budidaya. Untuk itu perlu adanya sinergi antar instansi terkait dalam memenuhi prasarana penunjang tersebut. Sedangkan sarana yang dibutuhkan seperti benih, pakan, obat – obatan, calon induk, KJA, dll masih perlu mendapatkan sentuhan dari pemerintah.

Ketersediaan Bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan buatan cukup banyak dan beragam jenisnya seperti bungkil sawit, dedak, kopra, ikan rucah dan lain sebagainya. Namun belum dimanfaatkan secara optimal, disamping itu kualitas daripada bahan baku tersebut masih tergolong rendah, hal ini disebabkan pengelolaan bahan baku masih menggunakan teknologi sederhana.

Tingginya harga pakan, merupakan masalah pada pengembangan perikanan budidaya. Harga pakan pabrik relatif tinggi, dan ada kecenderungan akan terus meningkat sejalan dengan ketergantungan akan impor bahan baku pakan dan sudah tentu harga akan disesuaikan dengan nilai tukar (kurs) dollar Ketersediaan Bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan buatan cukup banyak dan beragam jenisnya seperti bungkil sawit, dedak, kopra, ikan rucah dan lain sebagainya. Namun belum dimanfaatkan secara optimal, disamping itu kualitas daripada bahan

baku tersebut masih tergolong rendah, hal ini disebabkan pengelolaan bahan baku masih menggunakan teknologi sederhana.

Hal ini mengakibatkan biaya produksi usaha pembudidayaan ikan menjadi tinggi, sementara harga jual cenderung statis (tidak menunjukkan peningkatan harga yang signifikan), dan pada gilirannya tingkat keuntungan yang diterima pembudidaya rendah. Pada sisi lain, jumlah dan mutu benih serta Induk ikan belum memadai. Ketersediaan benih dan induk baik dari segi jumlah maupun mutu masih sangat rendah, sementara kebutuhan akan benih dan induk guna memenuhi target produksi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya.

Untuk itu, perlu upaya optimalisasi peran dan fungsi Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Balai Benih Ikan (BBI) Lokal, Kelompok Perbenihan Rakyat (KPR) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas calon induk ikan unggul dan peningkatan produksi benih, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi perbenihan serta penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

## 5. Nilai Tambah Produk Perikanan

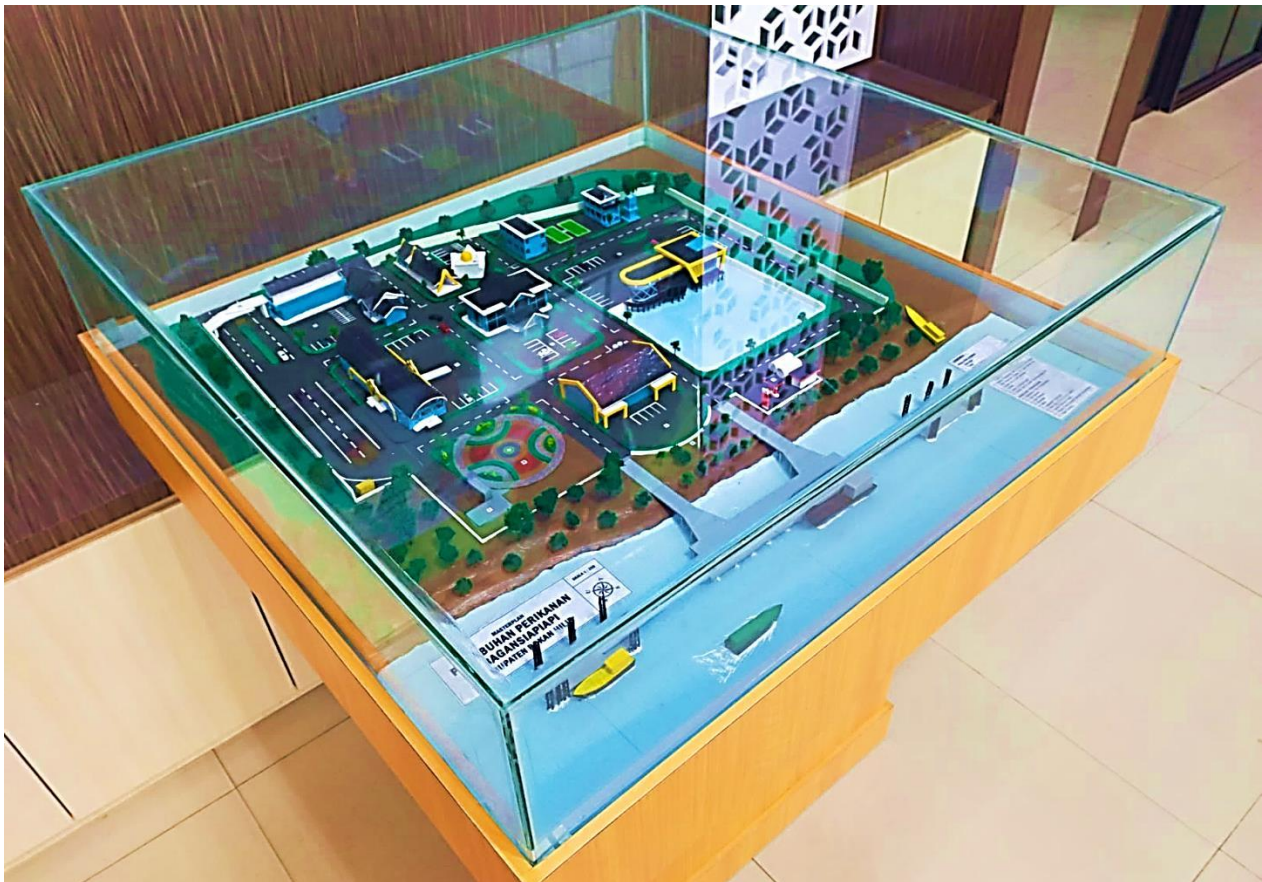
Ikan merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena kandungan proteinnya tinggi, mengandung asam amino esensial dan omega 3 dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Masalahnya adalah ikan memiliki kelemahan karena cepat mengalami pembusukan, maka perlu dilakukan penanganan, pengolahan dan pengawetan hasil perikanan yang bertujuan selain mencegah kerusakan ikan sehingga dapat memperpanjang daya simpan juga untuk menganeekaragamkan produk olahan hasil perikanan.

Masih dilakukannya penanganan dan perlakuan produk hasil perikanan yang tidak mengikuti kaidah ketahanan dan keamanan pangan komoditas produk hasil perikanan sesuai dengan SSOP, GMP dan HACCP, seperti pemakaian bahan berbahaya formalin dan borax pada aktivitas pengolahan pangan hasil perikanan dan pemakaian zat kimia berbahaya lainnya.

Pada sisi lain, dalam pengolahan produk hasil perikanan masih menggunakan teknologi sederhana sebagai contoh masih menggunakan kayu bakar dalam proses pengasapan/penyalai ikan. Inovasi sumberdaya manusia dalam proses pengolahan ikan masih terbatas, produk-produk yang dihasilkan masih turunan kedua seperti ikan asin, ikan salai, ikan kering (teri), ikan rebus dan ikan pindang.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



## **2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi kepala daerah yaitu:

- 1). Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan, Sasaran Misi Kepala Daerah yang kedua adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 2). Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Sasaran Misi kepala daerah
- 3) Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mencapai sasaran dari misi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perikanan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan		NTN	110	111	112	113
			NTPi	110	111	112	113
		1. Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	276.723,70	284.974,86	296.394,57	308.327,84
		2. Meningkatkan Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	84	79,04	82,2	85,48
		3. Meningkatkan Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	16	18	20	22

**Tabel 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2021-2024**

<b>VISI</b> :Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
<b>MISI 3</b> : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
<b>Tujuan</b> : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	- Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Sumberdaya Perairan Umum, Daratan dan Laut</li> <li>- Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap</li> <li>- Meningkatkan armada perikanan dan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan</li> <li>- Peningkatan pelayanan Operasioanl Pelabuhan Perikanan</li> <li>- Menerapkan kegiatan responsif gender dalam pengembangan diversifikasi usaha perikanan Tangkap</li> </ul>
		- Peningkatan Produksi Perikanan	- Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya

<b>VISI</b>	<b>:Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)</b>		
<b>MISI 3</b>	<b>: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>: Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing</b>		
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Produktifitas Perikanan Budidaya</li> <li>- Meningkatkan Pengendalian dan pemantauan kesehatan lingkungan perikanan budidaya</li> <li>- Meningkatkan produksi benih dengan kualitas dan kuantitas baik serta ramah lingkungan</li> <li>- Menerapkan kegiatan responsif gender dalam pengembangan diversifikasi usaha perikanan budidaya .</li> </ul>
		- Peningkatan Produksi Hasil Olahan	- Peningkatan kelembagaan dan infrastruktur pengolahan hasil perikanan, serta Penyediaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Tukar Nelayan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik

Formulasi perhitungan :

$$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Total penerimaan nelayan}}{\text{Total pengeluaran nelayan}} \times 100$$

Kriteria:

NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas.

NTN <100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit

2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik

Formulasi perhitungan :

$$\text{Nilai Tukar Pembudidaya Ikan} = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

NTPi= Nilai Tukar Pembudidaya

I<sub>t</sub> = Indeks harga yang diterima pembudidaya

I<sub>b</sub> = Indeks harga yang dibayar pembudidaya

Kriteria:

NTPi > 100, berarti pembudidaya mengalami peningkatan daya beli karena kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga input produksi dan konsumsi rumah tangganya

NTPi = 100, berarti pembudidaya mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga input produksi dan barang konsumsi rumah tangganya.

NTPi < 100, berarti pembudidaya mengalami defisit/penurunan daya belinya, karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan barang konsumsi rumah tangganya.

3. Produksi Perikanan (Ton)

Formulasi perhitungan :

$$\sum \text{Hasil Tangkapan Ikan Laut dan PUD} + \text{Hasil Budidaya Perikanan}$$

4. Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)

Formulasi perhitungan :

$$\text{PSDKP} = \frac{\text{Jumlah SDK Yang Dimanfaatkan (Ha)}}{\text{Jumlah Total Wilayah Kelola Laut (Ha)}} \times 100\%$$

Jumlah Total Wilayah Kelola Laut (Ha)

5. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)

Formulasi perhitungan :

$$x = \frac{C_i / S_i}{N} \times 100$$

Keterangan :

C<sub>i</sub> = Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh

S<sub>i</sub> = Jumlah Sampel Pelaku Usaha yang di periksa

N = Jumlah Komponen Pelaku Usaha

## 2.1.2. Strategi

Strategi yang akan dilakukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap,
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Produksi Hasil Olahan Perikanan
4. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan SDKP
5. Meningkatnya Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Sebagai tindak lanjut dari 5 (Lima) strategi tersebut diatas, maka ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (Lima) tahun ke depan adalah:

- Pemulihan Sumberdaya Perairan Umum, Daratan dan Laut
- Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- Meningkatkan armada perikanan dan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan
- Peningkatan pelayanan Operasional Pelabuhan Perikanan
- Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya
- Meningkatkan Produktifitas Perikanan Budidaya
- Meningkatkan Pengendalian dan pemantauan kesehatan lingkungan perikanan budidaya Meningkatkan produksi benih dengan kualitas dan kuantitas baik serta ramah lingkungan
- Peningkatan kelembagaan dan infrastruktur pengolahan hasil perikanan, serta Penyediaan akses pemasaran hasil perikanan
- Peningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasaran hasil perikanan dan Pemenuhan standar mutu produk perikanan
- Meningkatkan sinergitas dan frekwensi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan stake holders, serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Perikanan
- Meningkatkan Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi
- Penyediaan Dokumen Perencanaan Kawasan Tata Ruang Laut dan Pesisir

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau, guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, agar dapat segera memfasilitasi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, maka di laksanakan program atau kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1. Indikator Kinerja Program Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan**

No.	Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	
	Program	Indikator Kinerja Program
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
3.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Kelautan dan Perikanan (Ton)

Pengertian indikator dari sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat di terjemahkan yaitu:

1. Meningkatnya Kesadaran dan Penegakan Hukum adalah Persentase dari Pelaku Usaha yang Taat Hukum, dihitung dari Jumlah izin Tahun Berjalan dibagi Jumlah Total Izin tahun sebelumnya .
2. Jumlah Produk Hasil Budidaya adalah Hasil Perhitungan produksi (agregat) dari jumlah Populasi (luas lahan/m2) dikali jumlah produksi/jumlah produksi sampling (kg), Data berasal dari Satu Data KKP.
3. Jumlah Produk Hasil Tangkapan adalah Hasil Perhitungan produksi (angka agregat) dari Jumlah populasi (jumlah kapal, alat tangkap) dikali Produksi/jumlah sampling dibagi jumlah Produksi sampling (kg), Data berasal dari Satu Data KKP.
4. Jumlah Produk Hasil Pengolahan Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dibina adalah Total jumlah kawasan Perairan Daerah yang telah Dicadangkan sesuai Keputusan Gubernur seluas 285.439,96

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikeluarkannya. Adapun perjanjian kinerja sebagai berikut :



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YURNALIS, S.Sos.M.Si  
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S.F.HARIYANTO  
Jabatan : Pj.GUBERNUR RIAU  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Maret 2024

Pihak Kedua,  
Pj.GUBERNUR RIAU

  
S.F.HARIYANTO

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI RIAU

  
YURNALIS, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1971 0417 200212 1006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	308.327,84 (Ton)
		- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157.199,87 (Ton)
		- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	131.389,52 (Ton)
		- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	19.738,45 (Ton)
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%)	90 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (%)	Persentase Pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	22 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70 (BB)

No.	PROGRAM	APBD	DAK	ANGGARAN DEKONSENTRASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.091.374.833	-	378.000.000
2	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	1.024.999.630	500.000.000	548.800.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	28.402.679.713	15.265.227.000	510.950.000
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.360.669.721	2.333.000.000	499.842.000
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.468.442.735	500.000.000	178.252.000
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	499.047.008	-	373.800.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>75.847.213.640</b>	<b>18.598.227.000</b>	<b>2.489.644.000</b>

Pekanbaru, Maret 2024

Pj. GUBERNUR RIAU  
  
S. F. HARIYANTO

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU  
  
YURNALIS, S. Sos. M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1971 0417 200212 1006

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis RPJM DKP Provinsi Riau dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja DKP Provinsi Riau pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 56,01% Sebanyak 3 indikator mencapai target kinerja. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada table :

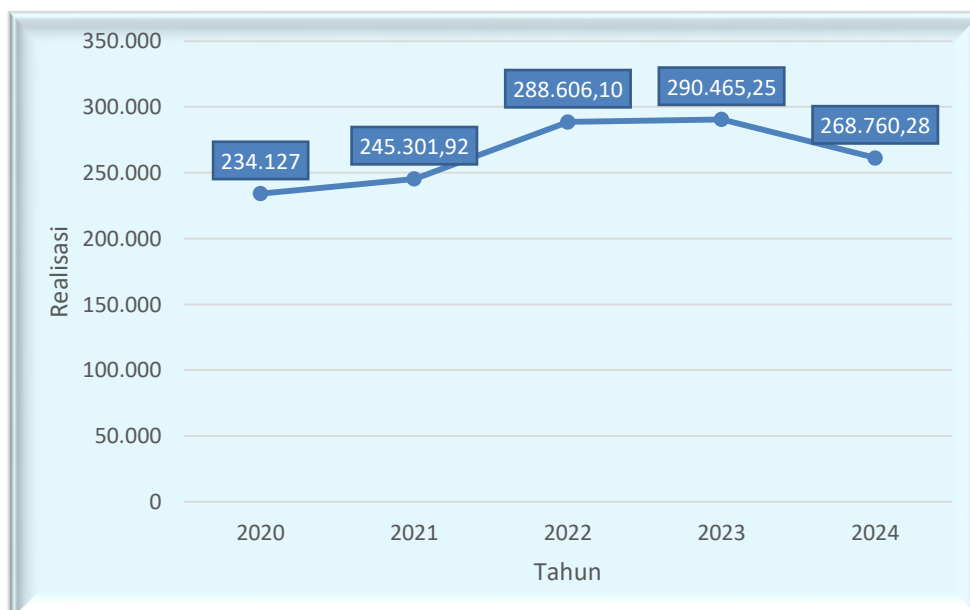
Tabel 3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	308.327,84	268.760,28	87,16
		- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157.199,87	125.775,57	80,00
		- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	131.389,52	127.470,63	97,00
		- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	19.738,45	15.514,08	78,59
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%).	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan (%)	90%	59,05%	65,61
3.	Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%)	Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	22%	11,66%	53,00
<b>Rata-rata</b>					<b>68,59</b>

### 3.1.1. SASARAN 1 : Meningkatkan Produksi Perikanan (Ton)



Produksi Perikanan dilihat dari trend di Riau menurun. Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2024 dengan indikator jumlah produksi perikanan (ton) (Hasil Produksi) dihitung berdasarkan rumus :  $\sum \text{Hasil Tangkapan Ikan Laut ton dan PUD} + \text{Hasil Budidaya Perikanan}$ , dengan penjumlahan hasil Tangkapan Ikan Laut 125.775,57 dan Hasil Budidaya Perikanan 127.470,63 ton didapatkan hasil 253.246,20 ton sedangkan Hasil Olahan Perikanan 15.514,08 ton. Jumlah keseluruhan Produksi Perikanan Tahun 2024 terealisasi sebesar 268.760,28 ton.



Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton) dengan Indikator Jumlah Produksi Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1.2. Capaian Realisasi Jumlah Produksi Perikanan (ton)**

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	308.327,84	268.760,28	87,16	296.394,57	290.465,25	98,00
	- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157.199,87	125.775,57	80,00	152.105,79	139.671,17	91,83
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	131.389,52	127.470,63	97,00	126.344,73	122.356,95	96,84
	- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	19.738,45	15.514,08	78,59	17.944,05	28.437,12	158,48

Sumber data : Dokumen LKJiP Tahun 2023 dan Dokumen Renstra 2020 – 2024

Pada aspek realisasi IKU ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2023 sebesar 290.466,25 ton menurun pada tahun 2024 sebesar 268.760,28 ton.

## 1. Analisis Penyebab kegagalan indikator

### a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)

Menurunnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2024 disebabkan :

- a. Mayoritas nelayan di Provinsi Riau merupakan nelayan kecil dengan area penangkapan ikan dipesisir. hal ini menyebabkan ikan hasil tangkapan sedikit.
- b. Penurunan produksi terbesar terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh :
  - Pelaksanaan Pendataan kembali sarana penangkapan ikan sehingga data penunjang khususnya jumlah RTP dan Armada mengalami perubahan;
  - Jumlah trip/hari melaut nelayan berkurang, jumlah RTP dan armada pada perairan laut dan Perairan Daratan mengalami penurunan;
  - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan daratan merupakan nelayan sambilan bukan nelayan penuh sehingga RTP dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan berkurang.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan



**Gambar 3.1.1.1.1**  
Penyerahan kapal penangkapan ikan  
(Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti)



**Gambar 3.1.1.1.2**  
Penyerahan alat penangkap ikan di  
Kabupaten Siak



**Gambar 3.1.1.1.3**  
Penyerahan alat penangkapan ikan di  
Kabupaten Rokan Hilir



**Gambar 3.1.1.1.4**  
Penyerahan alat penangkapan  
ikan di Kota Dumai



**Gambar 3.1.1.1.5**  
Penyerahan kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kab. Rokan Hilir



**Gambar 3.1.1.1.6**  
Penyerahan alat penangkapan ikan di  
Kabupaten Kepulauan Meranti



**Gambar 3.1.1.1.7**  
Penyerahan kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di  
Kabupaten Pelalawan



**Gambar 3.1.1.1.8**  
Penyerahan kapal fiber 1 GT Mesin Katinting di Kabupaten Rokan Hulu



**Gambar 3.1.1.1.9**  
Penyerahan kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kabupaten Kampar



**Gambar 3.1.1.1.10**  
Penyerahan Kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kab. Siak

**Gambar 3.1.1.1.11**  
Penyerahan Alat Penangkapan Ikan di Kab. Rokan Hilir



**Gambar 3.1.1.1.12**  
Penyerahan Kapal Fiber 1 GT Mesin Katinting di Kota Pekanbaru

2. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada nelayan/kelompok nelayan.



**Gambar 3.1.1.1.13**  
Sosialisasi Penerapan Log Book Penangkapan Ikan di Kabupaten Bengkalis



**Gambar 3.1.1.1.14**  
Sosialisasi Penerapan Log Book Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota untuk melibatkan penyuluh perikanan dalam pelaksanaan pendataan hasil produksi perikanan tangkap.



**Gambar 3.1.1.1.15**  
Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kota Dumai



**Gambar 3.1.1.1.16**  
Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis



**Gambar 3.1.1.1.17**  
Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti



**Gambar 3.1.1.1.18**  
Dokumentasi Koordinasi Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan



**Gambar 3.1.1.1.19**  
 Dokumentasi Koordinasi Perizinan  
 Perikanan Tangkap Tahun 2024  
 Kabupaten Rokan Hilir



**Gambar 3.1.1.1.20**  
 Dokumentasi Koordinasi Perizinan  
 Perikanan Tangkap Tahun 2024  
 Kabupaten Siak



**Gambar 3.1.1.1.21**  
 Dokumentasi Koordinasi Perizinan  
 Perikanan Tangkap Tahun 2024  
 Kabupaten Indragiri Hilir



**Gambar 3.1.1.1.22**  
 Dokumentasi Koordinasi Perizinan  
 Perikanan Tangkap Tahun 2024  
 Kabupaten Kepulauan Meranti



**Gambar 3.1.1.1.23**  
 Dokumentasi Koordinasi Perizinan  
 Perikanan Tangkap Tahun 2024  
 Kabupaten Rokan Hilir

Permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja, dalam meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024 dipengaruhi oleh aspek kurang memadainya Sarana Penangkapan ikan nelayan, Pola penangkapan yang one day trip, Armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil, dan Pelaksanaan pendataan masih kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM Pendata dengan luas wilayah pendataan yang tidak ideal.

Untuk menghadapi permasalahan dalam meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024 terdapat beberapa solusi :

1. Memberikan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan;
2. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada nelayan/kelompok nelayan;
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota untuk melibatkan penyuluh perikanan dalam pelaksanaan pendataan hasil produksi perikanan tangkap.

Dampak dari upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja tahun 2024 untuk meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan Pendapatan serta keamanan dan keselamatan kerja dengan alat tangkap yang lebih baik.
2. Pelatihan dan penyuluhan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan nelayan serta memberikan akses informasi yang lebih baik kepada nelayan tentang kebijakan pemerintah, teknologi baru, dan pasar.
3. Koordinasi dengan Dinas perikanan Kabupaten/Kota Pendataan hasil produksi perikanan tangkap yang akurat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran.

## b. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Menurunnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2024 disebabkan Tingginya harga pakan ikan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan harga jual ikan tidak sebanding dengan biaya pakan karena pakan ikan merupakan penyumbang terbesar dari biaya produksi yaitu 70-80% untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi maka perlu diadakan program pakan mandiri.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya;
2. Menggerakkan GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri).



**Gambar 3.1.1.1.24**

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Laut

Permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja, dalam meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 dipengaruhi oleh aspek lemahnya permodalan pelaku usaha pembudidaya ikan.

Untuk menghadapi permasalahan dalam meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 terdapat beberapa solusi :

1. Membuat pakan sendiri, kerjasama dengan BUMD atau mencari investor;
2. Membuat kajian dengan BRIDA untuk pembuatan pabrik pakan;
3. Ada pembuatan pabrik penggilingan padi di Rohil sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan pakan ikan.

Dampak dari upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Riau di pencapaian kinerja tahun 2024 dalam meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebagai berikut :

1. Sasaran terkait pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya, dampaknya akan meningkatkan produktivitas para pembudidaya;
2. Selain itu sasaran terkait menggerakkan GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) dampaknya mengurangi biaya operasional karena tidak perlu membeli pakan komersial yang harganya lebih mahal.

### c. Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)

Menurunnya Produksi Hasil Olahan Perikanan pada tahun 2024 dilihat dari target Produksi Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan Hasil Produksi pada tahun 2024 realisasi produksi tidak mencapai target. Disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Perubahan cuaca yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku (kabupaten Bengkalis, Pelalawan);
2. Permintaan pasar dan minat masyarakat terhadap hasil olahan mengalami penurunan karena lebih memilih ikan segar (Kabupaten Siak);
3. Beberapa UPI tidak berproduksi karena pelaku usaha yang sudah tua dan tidak ada keluarga yang melanjutkan usaha, meninggal dunia, dan beralih ke profesi lain (Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi);
4. Adanya perubahan cara menghitung produk olahan segar di kabupaten Kampar yang pada tahun 2023 semua produk ikan segar dimasukkan kedalam produk olahan segar. Sedangkan pada tahun 2024 yang dimasukkan kedalam produk olahan segar hanya ikan segar yang mengalami perlakuan.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di pencapaian kinerja Tahun 2024 dalam produksi hasil olahan perikanan sebagai berikut :

1. Menampilkan produk perikanan melalui pameran;
2. Melakukan pembinaan mutu hasil produk olahan ikan dalam menciptakan SDM UPI yang berkualitas sehingga produknya bisa dijual ke provinsi dan negara tetangga;
3. Melakukan Koordinasi dengan dinas terkait untuk pengembangan produk olahan;
4. Diverifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.



**Gambar 3.1.1.1.25**  
Menampilkan Produk Perikanan Melalui Pameran  
Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau  
Tahun 2024



**Gambar 3.1.1.1.26**  
Foto Bersama Pemenang Lmsi Dengan Pj. Ketua  
Tp-Pkk Dan Forikan Serta Kepala Dinas Kelautan  
Dan Perikanan Provinsi Riau



**Gambar 3.1.1.1.27**  
Proses penerimaan produk perikanan  
PT. AGRO BOGA UTAM KOTA PEKANBARU



**Gambar 3.1.1.1.28**  
CV. Bantan Sukses Bersama  
Kabupaten Bengkalis



**Gambar 3.1.1.1.29**  
CV. Bantan Sukses Bersama  
Kabupaten Bengkalis



**Gambar 3.1.1.1.30**  
Koperasi Bina Maju Jaya Kabupaten  
Rokan Hilir



**Gambar 3.1.1.1.31**  
PT. Delta Mina Perkasa Kabupaten Kampar



**Gambar 3.1.1.1.32**  
PT. Delta Mina Perkasa Kabupaten Kampar



**Gambar 3.1.1.1.33**  
CV. Hadi Wijaya Abadi Kabupaten  
Bengkalis



**Gambar 3.1.1.1.34**  
CV. Hadi Wijaya Abadi Kabupaten  
Bengkalis



**Gambar 3.1.1.1.35**  
Koperasi Jasa Kerapu Kabupaten Rokan Hilir



**Gambar 3.1.1.1.36**  
Koperasi Jasa Kerapu Kabupaten Rokan Hilir

Permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja, dalam Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Tahun 2024 dipengaruhi oleh :

1. Produksi olahan perikanan pada umumnya masih dilakukan secara tradisional;
2. Manajemen Pemasaran Hasil Produk Olahan masih sebatas memenuhi kebutuhan lokal;
3. Belum ada Koperasi yang menampung hasil produk olahan ikan;
4. Belum Optimalnya kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku bagi usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan;
5. Belum optimalnya pemahaman UPI terhadap kewajiban untuk memenuhi Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

6. Jenis ragam produk dan pengembangan produk bernilai tambah belum berkembang optimal dan belum populer.

Untuk menghadapi permasalahan dalam meningkatkan Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Tahun 2024 terdapat solusi, yaitu :

1. Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan Koordinasi dengan dinas terkait untuk pengembangan produk olahan;
3. Melakukan pembinaan mutu hasil produk olahan ikan dalam menciptakan SDM UPI yang berkualitas sehingga produknya bisa dijual ke provinsi dan negara tetangga;
4. Membuat kebijakan terkait pembatasan penjualan ikan ke luar, sehingga porsi untuk ke Riau tercukupi.

Dampak dari upaya yang dilakukan dinas kelautan dan perikanan provinsi Riau di pencapaian kinerja tahun 2024 dalam meningkatkan Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan sebagai berikut :

1. Pameran meningkatkan visibilitas produk perikanan Riau, menarik minat pembeli dari dalam dan luar provinsi, serta meningkatkan penjualan;
2. Peningkatan kualitas produk olahan ikan dan SDM yang terampil dalam pengolahannya memungkinkan produk Riau bersaing di pasar yang lebih luas;
3. Pembinaan mutu memastikan produk olahan ikan memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas yang tinggi, sehingga aman dikonsumsi dan dipercaya oleh konsumen;
4. Koordinasi dengan dinas terkait mempermudah akses informasi, sumber daya, dan dukungan untuk pengembangan produk olahan perikanan dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam memajukan sektor perikanan;
5. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, menyediakan produk yang lebih beragam bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator

Program yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan* terdiri 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Adapun Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan pagu anggaran Rp10.055.812.713,00 terealisasi sebesar Rp7.821.140.735,00 atau 77,78%, Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan pagu anggaran Rp1.917.783.000,00 terealisasi sebesar Rp340.547.178,00 atau 17,76%, dan Indikator Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan dengan pagu anggaran Rp322.625.000,00 terealisasi sebesar Rp131.835.720,00 atau 40,86%.

Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 32,55% atau setara dengan Rp4.002.697.080,00. Efisiensi ini didapat dari 1 (satu) program pagu anggaran sebesar Rp12.296.220.713,00 dan terealisasi sebesar Rp8.293.523.633,00.

### 3.1.2. SASARAN 2 :Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%)

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tahun 2024 dengan Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%) dihitung berdasarkan rumus :

Formulasi perhitungan :

$$x = \frac{Ci}{Si} * 100$$

N

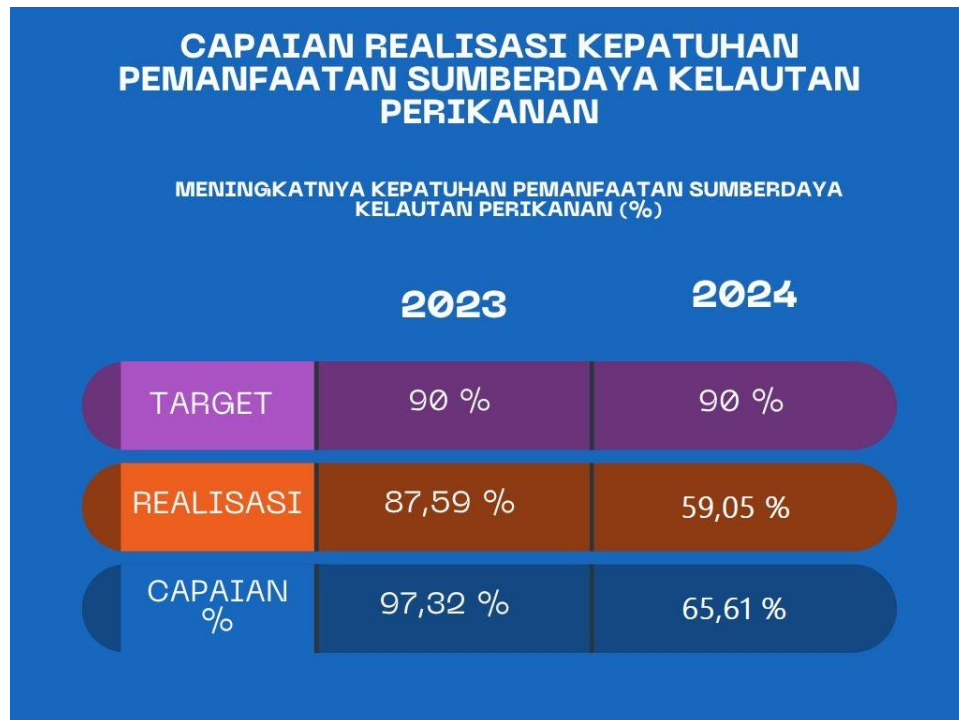
Keterangan :

Ci = Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh

Si = Jumlah Sampel Pelaku Usaha yang di periksa

N = Jumlah Komponen Pelaku Usaha

Dengan hasil formulasi perhitungan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 59,05% atau 64,61%.



Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan indikator Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1.3. Capaian Realisasi Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan**

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%).	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%)	90%	59,05%	65,61%	90%	87,59%	97,32%

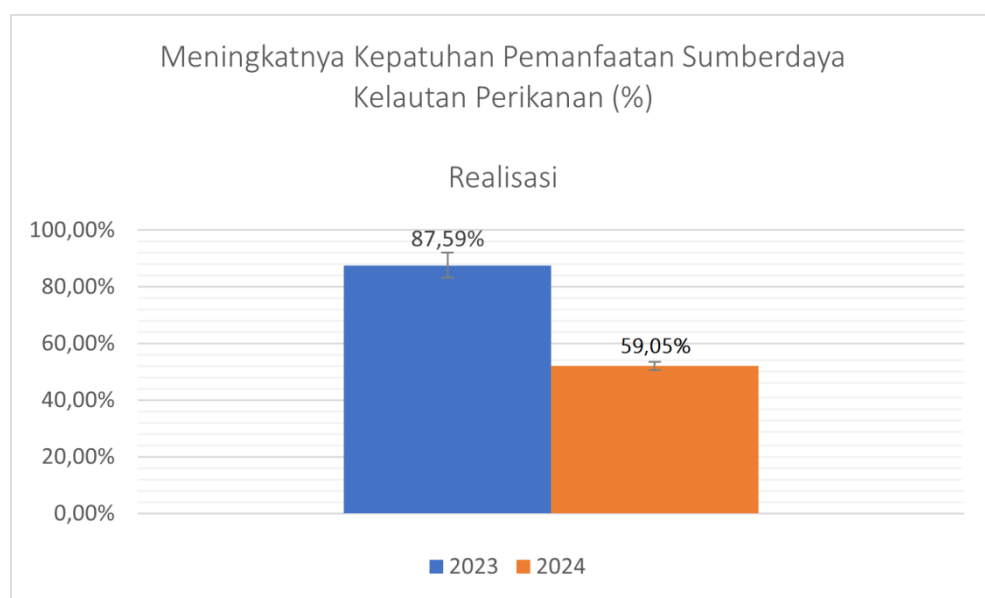
Sumber data : Dokumen LKJiP Tahun 2023 dan Dokumen Renstra 2020 – 2024

Pada aspek realisasi IKU ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2023 sebesar 87,59% menurun pada tahun 2024 sebesar 59,05% Menurunnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 disebabkan :

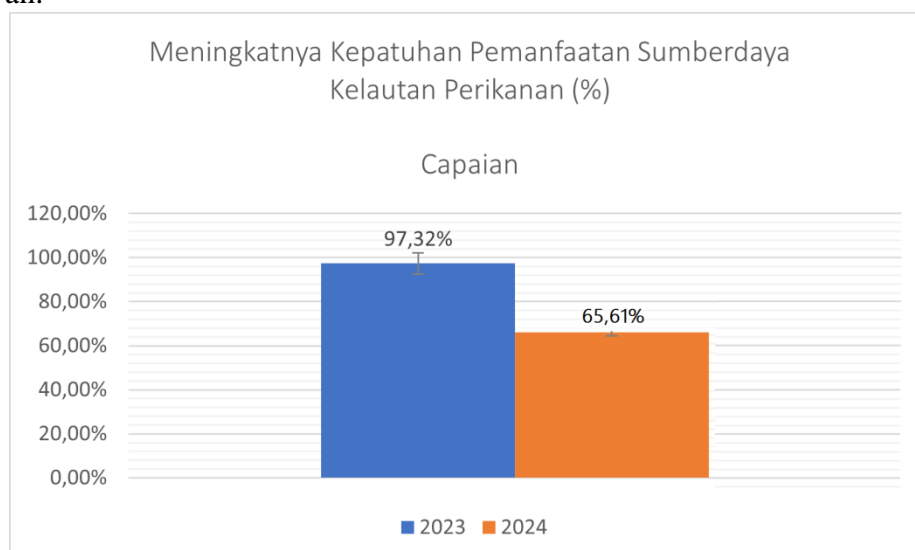
1. Kurang memadainya Sarana Penangkapan ikan nelayan;
2. Pola penangkapan yang one day trip;
3. Armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil;
4. Pelaksanaan pendataan masih kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM Pendata dengan luas wilayah pendataan yang tidak ideal;
5. Kuota BBM untuk melaut yang terbatas.

## 1. Analisis Penyebab kegagalan indikator Presentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan

Menurunnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja yaitu dikarenakan kurang memadainya Sarana Penangkapan ikan nelayan, Pola penangkapan yang one day trip, Armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil, Pelaksanaan pendataan masih kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM Pendata dengan luas wilayah pendataan yang tidak ideal dan kuota BBM untuk melaut yang terbatas.



Untuk menghadapi permasalahan dalam meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024 terdapat beberapa solusi yaitu Membuat pakan sendiri, kerjasama dengan BUMD, Membuat kajian dengan BRIDA untuk pembuatan pabrik pakan, Membuat kebijakan terkait pembatasan penjualan ikan ke luar, sehingga porsi untuk ke Riau tercukupi, ada pembuatan pabrik penggilingan padi di Rohil sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan pakan ikan dan Berkoordinasi dengan PERTAMINA terkait kebutuhan BBM nelayan.



Pencapaian Kinerja Tahun 2024 untuk meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan



**Gambar 3.1.2.1.1**  
Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Pengawasan Perikanan Tangkap ke Kabupaten Indragiri Hulu



**Gambar 3.1.2.1.2**  
Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Melakukan Identifikasi Lokasi Penanaman Mangrove Tahun Anggaran 2024 ke Kabupaten Kepulauan Meranti



**Gambar 3.1.2.1.3**  
Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Melakukan Identifikasi Lokasi Penanaman Mangrove Tahun Anggaran 2024 ke Kabupaten Kepulauan Meranti

## 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator

Program yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan* terdiri 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Adapun Indikator Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dengan pagu anggaran Rp601.640.000,00 terealisasi sebesar Rp512.232.500,00 atau 85,14%,

Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 14,86% atau setara dengan Rp89.407.500,00. Efisiensi ini didapat dari 1 (satu) program pagu anggaran sebesar Rp601.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp512.232.500,00.

Dampak dari yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja tahun 2024 untuk Penggunaan Sumberdaya (Keuangan dan SDM) yaitu; Menjamin keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang Provinsi Riau; Menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Provinsi Riau dengan memastikan produk perikanan aman dikonsumsi; dan Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk perikanan dari Provinsi Riau, sehingga meningkatkan daya saing dan pemasaran produk.

### 3.1.3. SASARAN 3 :Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%)

Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil di DKP Provinsi Riau Tahun 2024 dengan Indikator Persentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%) dihitung berdasarkan rumus :

Formulasi perhitungan :

$$\text{PSDKP} = \frac{\text{Jumlah SDK Yang Dimanfaatkan (Ha)}}{\text{Jumlah Total Wilayah Kelola Laut (Ha)}} \times 100\%$$

Dengan hasil formulasi perhitungan Persentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 11,66 % atau 53,00 %.



Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%), sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1.4. Capaian Realisasi Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%)**

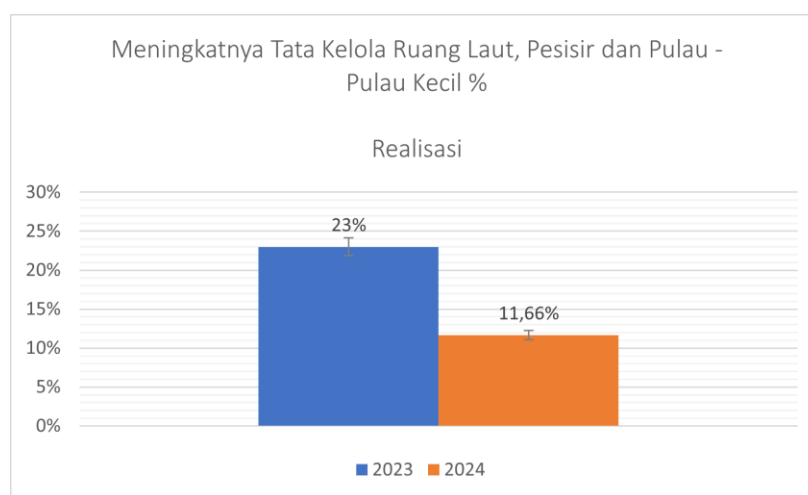
Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%)	Persentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	22%	11,66%	53,00%	20%	23%	115%

Sumber data : Dokumen LKJiP Tahun 2023 dan Dokumen Renstra 2020 – 2024.

Pada aspek realisasi IKU ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar 23% menurun pada tahun 2024 sebesar 11,66%. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024.

## 1. Analisis Penyebab Kegagalan Indikator Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Menurunnya Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Bahwa perhitungan Persentase merupakan Keseluruhan dari wilayah Kelola Laut di Provinsi Riau, Namun yang dihitung saat ini merupakan kawasan konservasi saja disebabkan/karena belum akhirnya RTRW Provinsi Riau.



Untuk Indikator Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan **belum bisa dilaksanakan**, dikarenakan konservasi perizinan yang dikeluarkan oleh Pusat menjadi hambatan dalam perhitungan capaian presentase pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan perikanan, upaya yang dilakukan yaitu dengan menyurati ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jumlah luasan perizinan yang sudah di keluarkan.

## Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Bidang Kelautan dan Pengawasan



**Gambar 3.1.3.1.1**  
Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Kota Dumai (PT. Inti Benua Perkasa)



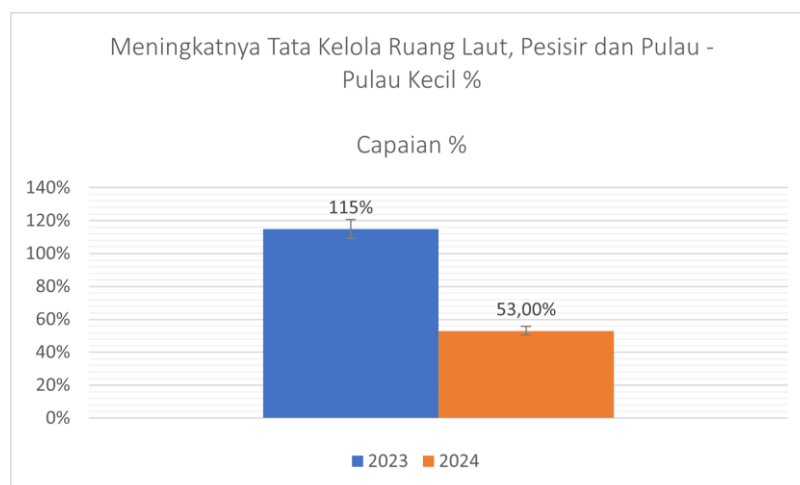
**Gambar 3.1.3.1.2**  
Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Kota Dumai (PT. Oleokimia Sejahtera Mas dan PT. Sari Dumai Sejati)



**Gambar 3.1.3.1.3**  
Dokumentasi Melaksanakan Tugas dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Kota Dumai (PT. Calang Sejati Indah dan PT. Ivomas Tunggal)

## 2. Analisis Efisiensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator

Program yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil* terdiri 1 (satu) program yaitu Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Adapun Indikator Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp1.013.287.630,00 terealisasi sebesar Rp891.405.150,00 atau 87,97%,



Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 12,03% atau setara dengan Rp121.882.480,00. Efisiensi ini didapat dari 1 (satu) program pagu anggaran sebesar Rp1.013.287.630,00 dan terealisasi sebesar Rp891.405.150,00.

Dampak dari yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja tahun 2024 untuk Peningkatan persentase pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau yang baik berdampak pada ketersediaan sumber protein hewani yang berkelanjutan bagi masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan menopang perekonomian masyarakat pesisir melalui sektor perikanan yang lestari.

## 3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau melalui DPA Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan total nilai keseluruhan anggaran adalah sebesar Rp77.023.161.497,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp66.470.397.462,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 86,30%.

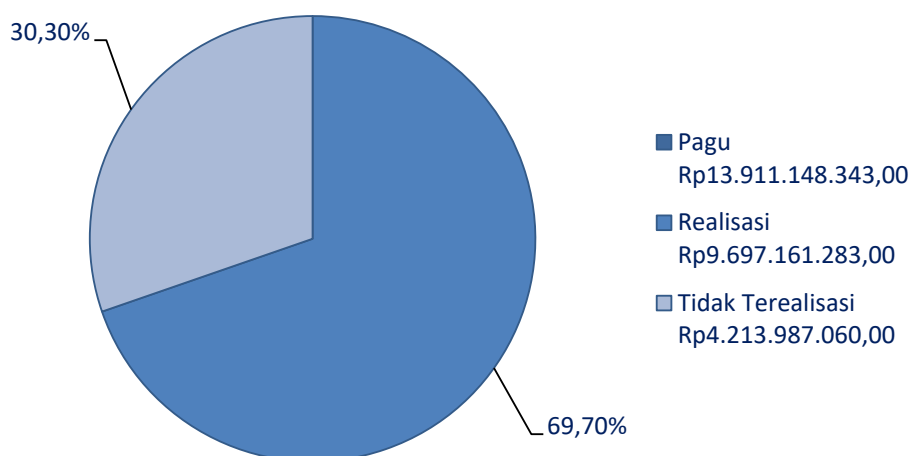
Rincian anggaran sebesar **Rp77.023.161.497,00** terdiri dari:

<b>A. Belanja Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>56.220.547.673,00</b>
1. Belanja Pegawai	Rp	27.541.384.763,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	28.679.162.910,00
<b>B. Belanja Modal</b>	<b>Rp</b>	<b>20.802.613.824,00</b>
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1.425.941.745,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	7.929.052.579,00
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	11.447.619.500,00

Untuk Realisasi anggaran sebesar **Rp66.470.397.462,00** terdiri dari:

<b>A. Belanja Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>47.598.021.202,00</b>
1. Belanja Pegawai	Rp	26.202.632.581,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	21.395.388.621,00
<b>B. Belanja Modal</b>	<b>Rp</b>	<b>18.872.376.259,57,00</b>
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1.193.861.273,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	7.267.742.106,00
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	10.410.772.880,00

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama Tahun 2024 didukung 5 (lima) program, Adapun Realisasi anggaran capaian sasaran strategis sebesar 69,70% atau setara dengan Rp9.697.161.283,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp13.911.148.343,00 dan tidak terealisasi sebesar Rp4.213.987.060,00, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik.



Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, **Penyerapan anggaran terbesar** ada pada **sasaran 1** yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 77,78%. **sasaran 2** yaitu Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan dengan Indikator Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan sebesar 87,97%, **sasaran 3** yaitu Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%) dengan indikator Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%) sebesar 85,13% **Penyerapan anggaran terendah** terjadi pada **sasaran 1** yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 17,76%, dan Indikator Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton) sebesar 40,86%. Secara rinci, realisasi anggaran dapat dilihat pada table 3.2.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	308.327,84	268.760,28	87,16	Rp12.296.220.713,00	Rp8.293.523.633,00	67,45%
		- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157.199,87	125.775,57	80,00	Rp10.055.812.713,00	Rp7.821.140.735,00	77,78,
		- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	131.389,52	127.470,63	97,00	Rp 1.917.783.000,00	Rp 340.547.178,00	17,76
		- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	19.738,45	15.514,08	78,59	Rp 322.625.000,00	Rp 131.835.720,00	40,86
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%).	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan (%)	90%	59,05%	65,61	Rp 601.640.000,00	Rp 512.232.500,00	85,13%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%)	Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	22%	11,66	53,00	Rp 1.013.287.630,00	Rp 891.405.150,00	87,97%

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama tahun 2024. LKJIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada tahun 2024 tidak berhasil mencapai kinerja dengan baik, dengan rata-rata 68,59%, sebagian besar sasaran strategis RPJM tidak mencapai target.

Sebagian besar sasaran strategis RPJM belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan. Terdapat 3 (tiga) target IKU yang tidak tercapai yaitu;

1. **Sasaran 1, Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)** terdiri dari :
  - a) Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap antaralain kurang memadainya sarana penangkapan ikan nelayan, pola penangkapan yang one day trip, armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil dan pelaksanaan pendataan masih kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM pendata dengan luas wilayah pendataan yang tidak ideal,
  - b). Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya antaralain : Lemahnya permodalan pelaku usaha pembudidaya ikan.
  - c). Indikator Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan antara lain Produksi olahan perikanan pada umumnya masih dilakukan secara tradisional; Manajemen Pemasaran Hasil Produk Olahan masih sebatas memenuhi kebutuhan lokal; Belum ada Koperasi yang menampung hasil produk olahan ikan; Belum Optimalnya kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan baku bagi usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan; Belum optimalnya pemahaman UPI terhadap kewajiban untuk memenuhi Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Jenis ragam produk dan pengembangan produk bernilai tambah belum berkembang optimal dan belum populer.
2. **Sasaran 2, Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%)**. yaitu Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan disebabkan oleh
  - a) Kurang memadainya Sarana Penangkapan ikan nelayan;
  - b) Pola penangkapan yang one day trip;
  - c) Armada penangkapan masih didominasi ukuran berskala kecil;
  - d) Pelaksanaan pendataan masih kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM Pendata dengan luas wilayah pendataan yang tidak ideal;
  - e) Kuota BBM untuk melaut yang terbatas.
3. **Sasaran 3, Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (%)** yaitu Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil disebabkan oleh Belum bisa dilaksanakan konversi perizinan yang di keluarkan Oleh Pusat menjadi hambatan dalam perhitungan capaian Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Provinsi Riau pada tahun 2024 tidak berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 terserap sebesar Rp Rp13.911.148.343,00 dan tidak terserap sebesar 30,29% atau senilai Rp4.213.987.060,00.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Next Level Reformasi Birokrasi pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat meningkat secara berkelanjutan dimasa yang akan datang.

## **4.2. LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN DKP PROVINSI RIAU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEDEPAN**

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ke depan, kami merumuskan serangkaian langkah strategis yang diharapkan dapat membawa dampak positif dan berkelanjutan pada sektor kelautan dan perikanan. Langkah-langkah ini meliputi:

1. Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kami akan menerapkan sistem penangkapan ikan yang terukur sesuai dengan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya overfishing, dengan memonitor dan membatasi jumlah tangkapan ikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem maritim.
2. Peningkatan Pengawasan. Kami akan meningkatkan intensitas pengawasan mulai dari proses keberangkatan kapal perikanan di pelabuhan, selama di perairan, hingga kedatangan di pelabuhan pendaratan. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa aktivitas perikanan berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan melindungi sumber daya kelautan dari eksploitasi yang berlebihan.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi. Memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi kelautan. Kami akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kawasan konservasi terkelola dengan baik, sehingga memberikan lingkungan yang sehat bagi berbagai jenis biota laut.
4. Kerjasama dengan Mitra Penyedia Pakan Ikan. DKP akan melakukan MoU dengan mitra yang dapat menyediakan pakan ikan dengan harga yang lebih kompetitif. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung peternakan ikan dan meningkatkan efisiensi biaya operasional para pembudidaya ikan di Provinsi Riau.
5. Pembinaan Mutu Hasil Produk Olahan Ikan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kami akan melakukan pembinaan terhadap mutu produk olahan ikan. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar lokal, tetapi juga dapat bersaing di pasar provinsi dan negara tetangga.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada, serta memberikan pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan. Di samping itu, kami juga akan memfasilitasi akses permodalan agar nelayan dapat lebih mudah dalam menjalankan usaha perikananannya, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem di daerah penangkapan ikan.
7. Pengaturan Musim Tebar Benih dan Monitoring Lingkungan. DKP akan mengatur musim tebar benih berdasarkan kondisi wilayah masing-masing dan mengurangi padat tebar ikan. Selain itu, kami akan melakukan monitoring terhadap Hama Penyakit Ikan (HPI) dan lingkungan untuk memastikan kesehatan serta keberlangsungan hidup ikan yang dibudidayakan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, DKP Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi permasalahan yang ada, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat pesisir serta pelestarian lingkungan hidup.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI RIAU

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



Jalan Pattimura No. 6  
Telp (0761) 22921  
Fax. (0761) 23191  
PEKANBARU - 28131  
2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YURNALIS, S.Sos.M.Si  
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S.F.HARIYANTO  
Jabatan : Pj.GUBERNUR RIAU  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Maret 2024

**Pihak Kedua,  
Pj.GUBERNUR RIAU**

  
**S.F.HARIYANTO**

**Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI RIAU**

  
**YURNALIS, S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1971 0417 200212 1006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	308.327,84 (Ton)
		- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	157.199,87 (Ton)
		- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	131.389,52 (Ton)
		- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	19.738,45 (Ton)
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%)	90 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (%)	Persentase Pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	22 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70 (BB)

No.	PROGRAM	APBD	DAK	ANGGARAN DEKONSENTRASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.091.374.833	-	378.000.000
2	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	1.024.999.630	500.000.000	548.800.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	28.402.679.713	15.265.227.000	510.950.000
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.360.669.721	2.333.000.000	499.842.000
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.468.442.735	500.000.000	178.252.000
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	499.047.008	-	373.800.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>75.847.213.640</b>	<b>18.598.227.000</b>	<b>2.489.644.000</b>

Pekanbaru, Maret 2024

**PI GUBERNUR RIAU**  
  
**S. F. HARIYANTO**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**  
  
**YURNALIS, S. Sos. M. Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 1971 0417 200212 1006

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2024  
DATA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU APBD-P (Rp)	Bobot (%)	Progres Keuangan				Progres Fisik				Sisa Pagu (Rp)
						Target		Realisasi SP2D		Target	Tertimbang	Realisasi	Tertimbang	
						(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
	SEKRETARIAT			36.178.431.084	46,36	36.178.431.084	100	33.931.526.306,03	93,79	100	46,36	99,39	46,08	2.246.904.778
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>													
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	27.541.384.763	35,29	27.541.384.763	100,00	26.202.632.581,00	95,14	100,00	35,29	100,00	35,29	1.338.752.182
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					-								
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	352.235.598	0,45	352.235.598	100,00	297.466.500,00	84,45	100,00	0,45	84,45	0,38	54.769.098
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					-								
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	62 Paket	196.361.318	0,25	196.361.318	100,00	194.478.200,00	99,04	100,00	0,25	99,04	0,25	1.883.118
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan	10.428 Paket	235.002.000	0,30	235.002.000	100,00	200.362.000,00	85,26	100,00	0,30	85,26	0,26	34.640.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Laporan yang dicetak dan digandakan	15 Paket	103.300.783	0,13	103.300.783	100,00	103.300.783,00	100,00	100,00	0,13	100,00	0,13	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	960.402.088	1,23	960.402.088	100,00	891.089.697,00	92,78	100,00	1,23	92,78	1,14	69.312.391
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					-								
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	139.817.006	0,18	139.817.006	100,00	0,00	0,00	100,00	0,18	86,92	0,16	139.817.006
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.672.992.995	2,14	1.672.992.995	100,00	1.668.170.971,00	99,71	100,00	2,14	100,00	2,14	4.822.024
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	1.149.461.785	1,47	1.149.461.785	100,00	1.110.407.656,00	96,60	100,00	1,47	100,00	1,47	39.054.129
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	349.373.419	0,45	349.373.419	100,00	347.226.206,00	99,39	100,00	0,45	100,00	0,45	2.147.213
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	278 Unit	133.000.000	0,17	133.000.000	100,00	133.000.000,00	100,00	100,00	0,17	100,00	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara												
12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.345.099.329	4,29	3.345.099.329	100,00	2.783.391.712,03	83,21	100,00	4,29	98,73	4,23	561.707.617
	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN</b>			<b>2.628.215.260</b>	<b>2,07</b>	<b>1.614.927.630</b>	<b>61,45</b>	<b>1.403.637.650,00</b>	<b>53,41</b>	<b>68,73</b>	<b>1</b>	<b>97,88</b>	<b>2</b>	<b>1.224.577.610</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)</b>		<b>1.013.287.630</b>		-								
	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>					-								
13	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	144633,74 Ha	688.287.933	0,88	688.287.933	100,00	620.196.650,00	90,11	100,00	0,88	100,00	0,88	68.091.283
14	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Hektar	249.999.877	0,32	249.999.877	100,00	230.444.000,00	92,18	100,00	0,32	100,00	0,32	19.555.877
15	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>				-								
16	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	9 Rekomendasi	74.999.820	0,10	74.999.820	100,00	40.764.500,00	54,35	100,00	0,10	90,00	0,09	34.235.320
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					-								
	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan</b>	<b>20 Dokumen</b>			-								
17	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	30 Dokumen	42.500.000	0,05	42.500.000	100,00	11.463.750,00	26,97	100,00	0,05	50,00	0,03	31.036.250
18	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	20 Dokumen	54.220.000	0,07	54.220.000	100,00	27.471.250,00	50,67	100,00	0,07	90,00	0,06	26.748.750
19	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		4.920.000	0,01	4.920.000	100,00	3.367.500,00	68,45	100,00	0,01	100,00	0,01	1.552.500
20	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			500.000.000	0,64	500.000.000	100,00	469.930.000,00	93,99	100,00	0,64	100,00	0,64	30.070.000

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
	<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>			10.055.812.713	12,89	10.055.812.713	100,00	7.821.140.735,00	77,78	100,00	12,89	100,00	12,89	2.234.671.978
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)</b>				-								
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan</b>				-								
21	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	85.918.294	0,11	85.918.294	100,00	75.960.280,00	88,41	100,00	0,11	100,00	0,11	9.958.014
22	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1545 Unit	5.679.351.750	7,28	5.679.351.750	100,00	3.537.965.612,00	62,30	100,00	7,28	100,00	7,28	2.141.386.138
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi</b>					-								
23	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	40 Unit	4.194.551.600	5,38	4.194.551.600	100,00	4.120.506.274,00	98,23	100,00	5,38	100,00	5,38	74.045.326
	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>Jumlah perizinan berusaha perikanan tangkap yang diterbitkan untuk kapal perikanan</b>				-								
24	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	170 Rekomendasi	95.991.069	0,12	95.991.069	100,00	86.708.569,00	90,33	100,00	0,12	100,00	0,12	9.282.500
	<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA</b>			1.917.783.000	2,46	1.917.783.000	100,00	340.547.178,00	17,76	91,85	2,26	27,28	0,67	1.577.235.822
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(ton)</b>	131.379,52			-								
	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>	<b>Jumlah perizinan berusaha perikanan budidaya di Laut sampai Dengan 12 Mil yang</b>	10 Izin			-								
25	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	99.490.000	0,13	99.490.000	100,00	50.783.250,00	51,04	100,00	0,13	89,72	0,11	48.706.750
	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</b>	80 Rekomendasi			-								
26	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80 Rekomendasi	56.795.000	0,07	56.795.000	100,00	36.767.800,00	64,74	100,00	0,07	97,15	0,07	20.027.200
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		3 Kawasan			-								
27	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Bantuan Sarana untuk Kelompok Pembudidaya Ikan	17 Unit	1.563.130.000	2,00	1.563.130.000	100,00	120.855.500,00	7,73	100,00	2,00	11,82	0,24	1.442.274.500
28	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1 Dokumen	101.663.000	0,13	101.663.000	100,00	50.068.608,00	49,25	100,00	0,13	97,14	0,13	51.594.392
29	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	90 Orang	96.705.000	0,12	96.705.000	100,00	82.072.020,00	84,87	100,00	0,12	98,50	0,12	14.632.980
	<b>BIDANG PENGOLAHAN DAN</b>			322.625.000	0,41	322.625.000	100,00	131.835.720,00	40,86	100,00	0,41	58,31	0,24	190.789.280

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
	<b>PEMASARAN HASIL KELAUTAN PERIKANAN (P2HKP)</b>													
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						-							
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>						-							
30	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 unit	63.268.000	0,08	63.268.000	100,00	27.195.000,00	42,98	100,00	0,08	63,68	0,05	36.073.000
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>						-							
31	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	259.357.000	0,33	259.357.000	100,00	104.640.720,00	40,35	100,00	0,33	57,00	0,19	154.716.280
	<b>UPT PSDKP WILAYAH I</b>			649.209.995	0,83	649.209.995	100,00	394.546.497,00	60,77	100,00	0,83	83,10	0,69	254.663.498
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						-							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						-							
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8.016.495	0,01	8.016.495	100,00	7.662.500,00	95,58	100,00	0,01	100,00	0,01	353.995
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.032.000	0,01	10.032.000	100,00	10.030.000,00	99,98	100,00	0,01	100,00	0,01	2.000
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	2.770.000	0,00	2.770.000	100,00	2.770.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.720.000	0,08	59.720.000	100,00	58.146.877,00	97,37	100,00	0,08	100,00	0,08	1.573.123
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						-							
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	203.914.560	0,26	203.914.560	100,00	203.895.120,00	99,99	100,00	0,26	100,00	0,26	19.440
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						-							
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	15.332.300	0,02	15.332.300	100,00	13.932.000,00	90,87	100,00	0,02	100,00	0,02	1.400.300
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	9.940.000	0,01	9.940.000	100,00	6.970.000,00	70,12	100,00	0,01	100,00	0,01	2.970.000
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						-							
	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>						-							

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
39	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	60 Dokumen	322.724.640	0,41	322.724.640	100,00	89.670.000,00	27,79	100,00	0,41	68,60	0,28	233.054.640
40	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	9 Dokumen	16.760.000	0,02	16.760.000	100,00	1.470.000,00	8,77	100,00	0,02	50,00	0,01	15.290.000
<b>UPT. WILAYAH II</b>				<b>957.287.620</b>	<b>1,23</b>	<b>957.287.620</b>	<b>100,00</b>	<b>902.228.620,00</b>	<b>94,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>95,75</b>	<b>1,17</b>	<b>55.059.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>														
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	56.093.902	0,07	56.093.902	100,00	56.093.902,00	100,00	100,00	0,07	100,00	0,07	-
42	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	288 Paket	6.624.000	0,01	6.624.000	100,00	6.624.000,00	100,00	100,00	0,01	100,00	0,01	-
43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.087.046	0,01	4.087.046	100,00	4.087.046,00	100,00	100,00	0,01	100,00	0,01	-
44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.394.000	0,03	26.394.000	100,00	13.745.000,00	52,08	100,00	0,03	100,00	0,03	12.649.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	195.920.480	0,25	195.920.480	100,00	195.920.480,00	100,00	100,00	0,25	100,00	0,25	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	17.894.192	0,02	17.894.192	100,00	17.894.192,00	100,00	100,00	0,02	100,00	0,02	-
47	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	14.420.000	0,02	14.420.000	100,00	14.420.000,00	100,00	100,00	0,02	100,00	0,02	-
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>														
<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>														
48	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	602.868.000	0,77	602.868.000	100,00	571.110.000,00	94,73	100,00	0,77	95,00	0,73	31.758.000
49	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	4 Dokumen	32.986.000	0,04	32.986.000	100,00	22.334.000,00	67,71	100,00	0,04	68,01	0,03	10.652.000
<b>UPT. WILAYAH III</b>				<b>989.984.652</b>	<b>1,27</b>	<b>989.984.652</b>	<b>100,00</b>	<b>806.563.288,00</b>	<b>81,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>	<b>89,41</b>	<b>1,13</b>	<b>183.421.364</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>														
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.705.465	0,02	16.705.465	100,00	16.691.020,00	99,91	100,00	0,02	100,00	0,02	14.445
50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.180.000	0,01	6.180.000	100,00	6.180.000,00	100,00	100,00	0,01	100,00	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.622.759	0,00	1.622.759	100,00	1.615.600,00	99,56	100,00	0,00	100,00	0,00	7.159
50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	32.950.000	0,04	32.950.000	100,00	32.290.000,00	98,00	100,00	0,04	100,00	0,04	660.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					-								
54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	38.249.120	0,05	38.249.120	100,00	20.853.000,00	54,52	100,00	0,05	54,52	0,03	17.396.120
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
55	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	230.486.708	0,30	230.486.708	100,00	230.406.468,00	99,97	100,00	0,30	100,00	0,30	80.240
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	21.310.600	0,03	21.310.600	100,00	21.261.700,00	99,77	100,00	0,03	100,00	0,03	48.900
56	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.940.000	0,01	3.940.000	100,00	3.940.000,00	100,00	100,00	0,01	100,00	0,01	-
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					-								
	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>					-								
58	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	75 Dokumen	599.930.000	0,77	599.930.000	100,00	471.005.500,00	78,51	100,00	0,77	90,00	0,69	128.924.500
59	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	30 Dokumen	38.610.000	0,05	38.610.000	100,00	2.320.000,00	6,01	100,00	0,05	28,80	0,01	36.290.000
	<b>UPT. BUDIDAYA PERIKANAN</b>			<b>6.306.043.001</b>	<b>8,08</b>	<b>6.306.043.001</b>	<b>100,00</b>	<b>4.006.434.085,00</b>	<b>63,53</b>	<b>26,75</b>	<b>2,16</b>	<b>98,65</b>	<b>7,97</b>	<b>2.299.608.916</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					-								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					-								
60	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	84.180.712	0,11	84.180.712	100,00	50.223.672,00	59,66	100,00	0,11	100,00	0,11	33.957.040
61	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	0,02	12.000.000	100,00	11.994.000,00	99,95	100,00	0,02	100,00	0,02	6.000
62	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.600.000	0,01	9.600.000	100,00	9.549.000,00	99,47	100,00	0,01	100,00	0,01	51.000
63	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	152.000.000	0,19	152.000.000	100,00	150.561.950,00	99,05	100,00	0,19	100,00	0,19	1.438.050
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	973.308.480	1,25	973.308.480	100,00	966.269.832,00	99,28	100,00	1,25	100,00	1,25	7.038.648
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
65	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	123.480.000	0,16	123.480.000	100,00	123.456.100,00	99,98	100,00	0,16	100,00	0,16	23.900
66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	332.484.950	0,43	332.484.950	100,00	325.078.252,00	97,77	100,00	0,43	100,00	0,43	7.406.698
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>					-								
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>					-								
67	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	2.256.350.000	2,89	2.256.350.000	100,00	509.596.921,00	22,59		-	99,48	2,88	1.746.753.079
67	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	2.362.638.859	3,03	2.362.638.859	100,00	1.859.704.358,00	78,71		-	96,89	2,93	502.934.501
	<b>UPT PMHP</b>			592.546.998	0,76	592.546.998	100,00	590.878.222,00	99,72	100,00	0,76	100,00	0,76	1.668.776
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>10%</b>			-								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan)</b>	<b>6 Jenis</b>			-								
69	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.972.206	0,01	9.972.206	100,00	9.957.200,00	99,85	100,00	0,01	100,00	0,01	15.006
70	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.139.858	0,00	2.139.858	100,00	2.139.500,00	99,98	100,00	0,00	100,00	0,00	358
71	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.656.080	0,05	42.656.080	100,00	42.397.500,00	99,39	100,00	0,05	100,00	0,05	258.580
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>2 jenis</b>			-								
72	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	264.943.008	0,34	264.943.008	100,00	264.943.008,00	100,00	100,00	0,34	100,00	0,34	-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Jenis</b>			-								
73	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	29.523.838	0,04	29.523.838	100,00	29.523.000,00	100,00	100,00	0,04	100,00	0,04	838
74	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	93.000.000	0,12	93.000.000	100,00	92.624.275,00	99,60	100,00	0,12	100,00	0,12	375.725

1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13	14	15
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (Ton)</b>	<b>19.738,45</b>			-								
	<b>Kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan</b>	<b>15 Unit Usaha</b>			-								
75	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	7 Unit Usaha	150.312.008	0,19	150.312.008	100,00	149.293.739,00	99,32	100,00	0,19	100,00	0,19	<b>1.018.269</b>
	<b>UPT.PELABUHAN PERIKANAN</b>			<b>17.438.509.804</b>	<b>22,35</b>	<b>17.438.509.804</b>	<b>100,00</b>	<b>16.141.059.160,54</b>	<b>92,56</b>	<b>100,00</b>	<b>22,35</b>	<b>99,98</b>	<b>22,34</b>	<b>1.297.450.643</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					-								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					-								
76	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	106.721.981	0,14	106.721.981	100,00	105.177.085,00	98,55	100,00	0,14	98,55	0,13	<b>1.544.896</b>
77	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.771.943	0,01	4.771.943	100,00	4.760.000,00	99,75	100,00	0,01	100,00	0,01	<b>11.943</b>
78	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.868.440	0,01	9.868.440	100,00	9.867.827,00	99,99	100,00	0,01	99,99	0,01	<b>613</b>
79	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	93.652.500	0,12	93.652.500	100,00	91.981.500,00	98,22	100,00	0,12	98,22	0,12	<b>1.671.000</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
80	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2.400.000	0,00	2.400.000	100,00	2.400.000,00	53,23	100,00	0,00	100,00	0,00	-
81	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	433.427.940	0,56	433.427.940	100,00	433.427.940,00	100,00	100,00	0,56	100,00	0,56	-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-								
82	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	73.440.000	0,09	73.440.000	100,00	73.026.000,00	99,44	100,00	0,09	100,00	0,09	<b>414.000</b>
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>157.199,87</b>			-								
	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola</b>	<b>1 Unit</b>			-								
83	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	16.714.227.000	21,42	16.714.227.000	100,00	15.420.418.808,54	92,26	100,00	21,42	100,00	21,42	<b>1.293.808.191</b>
				<b>78.036.449.127</b>	<b>98,7015201</b>	<b>77.023.161.497</b>	<b>98,70</b>	<b>66.470.397.461,57</b>	<b>85,18</b>		<b>92,36</b>		<b>95,97</b>	<b>11.059.407.850</b>

## Penghargaan yang Diperoleh Selama Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penerimaan	Dokumentasi
1	Atas Peran Sertanya Dalam Penyelamatan Arsip Melalui Penyerahan Arsip Statis Tahun 2021 S.D 2024	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau	05 November 2024	
2	Komplikasi Data Statistik Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau	05 Desember 2024	
3	Lomba Mancing Di Laut Dumai Dan Lomba Kapal Hias	RIAU FISHING	03 Agustus 2024	
4	Sebagai UPZ Pembantuan Pendayagunaan Terbaik 2024 BAZNAS	BAZNAS Provinsi Riau	03 Oktober 2024	
5	Penghargaan Tata Kelola Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2024	Badan Standarisasi Nasional	20 November 2024	
6	Menuju Informatif PPID Pelaksanaan Provinsi Riau	Komisi Informasi Riau Award 2024	2024	

